

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Gubernur Kalimantan Tengah

Selasa 29 Juni 2021, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Anggota IV BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK **Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.** dan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah **Wiyatno, SP** dan Gubernur Kalimantan Tengah **H. Sugianto Sabran.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ditujukan untuk **memberikan opini** atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020. Selain itu BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya, yang merupakan penjabaran dari salah satu Misi Pendidikan "Kalteng Berkah" yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2020 terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan, dan LHP atas Kinerja (Buku III).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2020.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang ketujuh kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanpa mengurangi keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan anggaran Tahun 2020, dalam sambutannya **Isma Yatun** menyampaikan bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya :

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2020 belum sepenuhnya memadai;
2. Pengelolaan Kas pada BUD, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan belum sepenuhnya memadai;
3. Kekurangan Volume pada pekerjaan jalan, irigasi dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13,15 milyar;
4. Kelebihan pembayaran insentif atas pajak daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp1,54 milyar;
5. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai; dan
6. Penatusahaan Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Doris Sylvanus belum sepenuhnya tertib.

Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, saat ini BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dimana LHPnya berupa Long Form Audit Report (LFAR), yaitu pemeriksaan kinerja Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK. Dengan tidak mengesampingkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BPK masih menemukan permasalahan antara lain:

1. RKA Dinas Pendidikan TA 2020, khususnya anggaran pemenuhan prasarana pendidikan, belum sepenuhnya sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Tata Laksana Pemenuhan Prasarana SMAN dan SMKN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS); dan
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana.

BPK menyimpulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah **cukup efektif** dalam pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 dalam rangka tercapainya Standar Nasional Pendidikan untuk prasarana yang memadai.

“Opini WTP yang sudah diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduknya” **jelas Isma Yatun**. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan, menurunnya pengangguran, menurunnya gini ratio, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id